

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
TRADISIONAL BERALKOHOL “TUAK” BERDASARKAN PASAL
18 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2016**

(Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ICHSAN HABIBUROHMAN

NIM. 145010100111097



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Tuban	44
---	----



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektifitas Hukum	16
B. Pengawasan dan Pengendalian	19
C. Minuman Beralkohol.....	22
D. Tuak.....	24
E. Penjual Minuman Beralkohol	28
F. Perizinan	28

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Populasi dan Sampel.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Definisi Operasional.....	41

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban	43
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban	49
B. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak”	59
C. Hambatan serta solusi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman tradisional beralkohol “Tuak”	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Tabel Penelitian Terdahulu	8
Tabel II Administratif Wilayah Kabupaten Tuban	45
Tabel III Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Tuban	47
Tabel IV Klasifikasi Minuman Beralkohol	64
Tabel V Daftar Penjual “Tuak” yang pernah didapati dan diberikan surat peringatan.	69
Tabel VI Bentuk Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017	71
Tabel VII Bentuk Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018	72

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAGI PENJUAL
MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL “TUAK” BERDASARKAN
PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9
TAHUN 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban)**

OLEH:

ICHSAN HABIBUROHMAN

145010100111097

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Lutfi Effendi, S.H, M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H, M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAGI PENJUAL MINUMAN TRADISIONAL
BERALKOHOL “TUAK” BERDASARKAN PASAL 18
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR
9 TAHUN 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban)**

Identitas Penulis

Nama : Ichsan Habiburohman
NIM : 145010100111097
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan
Disetujui pada tanggal : 30 November 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH.,M.hum

Nurdin, SH.,M.hum

NIP. 196008101986011002

NIP. 195612071986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.,M.hum

NIP. 196008101986011002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji, syukur kepada Allah SWT, karena dengan berkah, rahmat, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Sempurna dan Maha Segala-Nya, terima kasih telah memberikan semua hal yang saya dapatkan selama ini.
2. Bapak Dr, Rachmad Syifa'at, S.H., M.S.i selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, kesabaran, dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pendamping yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk mengoreksi dalam penyusunan skripsi ini
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan, ilmu, wawasan dan pengalaman sehingga penulisa dapat memperbanyak ilmunya, dan semoga berguna bagi orang lain

6. Keluarga tersayang, terutama Ayah Sucan Hadi dan Ibu Siti Mulyani yang telah memberikan perhatian, didikan, dan motifasi sehingga anaknya bisa meraih gelar sarjana hukum
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban yang telah memberikan ijinnya sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban
8. Sahabat-sahabat terbaik Adiba Dhityanisa, Kramayuda Romilindo, Andhika Meilana, Tio Rahmat Januar, Arga Purwa, Jhon Dhony, Ali Tamam, Ivan Yusaferi, Budi Siwur, yang telah memberikan banyak sekali semangat, bantuan, dan inspirasi yang tak terhingga sehingga penulis tetap semangat dalam penyusunan laporan skripsi ini

Penulis menyadari segala kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada satu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan bagi dunia pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar- besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2018

Ringkasan

Ichsan Habiburohman, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, September 2018, Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Bagi Penjual Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Nurdin, S.H., M.Hum.

Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyak terjadi peredaran minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban. Peredaran minuman tradisional beralkohol “Tuak” tidak hanya diminum oleh kalangan dewasa saja, tetapi para remaja dan siswa sekolahpun juga ikut menjadi penkonsumsinya. Minuman tradisional beralkohol “Tuak” merupakan minuman beralkohol yang diproses dari hasil pertanian. Minuman tradisional beralkohol “Tuak” tergolong sebagai minuman beralkohol golongan A, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 penjual langsung minuman beralkohol golongan A harus mempunyai surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A. Ternyata masih banyak penjual minuman tradisional beralkohol yang tidak memiliki izin tersebut. Penjual minuman tradisional beralkohol menjual minuman tradisional beralkohol di warung-warung dan di trotoar jalan wilayah kabupaten tuban. Satpol pp kabupaten tuban adalah aparat penegak peraturan perundang-undangan daerah di kabupaten tuban. Itulah yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi penelitian dan studi di Satpol Pp Kabupaten Tuban.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 ? (2) apa saja hambatan serta solusi dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 sampai saat ini belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban selaku pihak yang berwenang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman tradisional beralkohol “Tuak”, dari pihak Satpol PP tidak pernah menemukan penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang memiliki Izin SKPL-A dan juga tidak pernah menindak lanjut dengan pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana hanya memberikan surat peringatan.

Kata kunci : Tuak, Pengawasan Pengendalian



SUMMARY

Ichsan Habiburohman, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, September 2018, The Effectiveness Of Supervision And Control for Traditional Alcohol Seller “Tuak” based in 18 regulations Tuban distric Number 9 year 2016 (Case study in Municipal Police Units Tuban distric), Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum, Nurdin,S.H.,M.Hum

The selection of the title was motivated by a lot of circulation of drinks traditional alcohol "Tuak" in Tuban Regency. Distribution of traditional drinks alcohol "Tuak" is not only consumed by adults, but the people even teenagers and school students also take part in the consumption. This traditional alcohol drink "Tuak" is processed from agricultural product. Traditional alcohol "Tuak" are classified as alcohol class A. based on Article 1 number 18 District Regulation Tuban number 9 in 2016 direct sellers of class A alcohol drinks must be have a certificate of direct seller of class A alcohol beverages hereinafter referred to as SKPL-A. Apparently there are still many traditional drink sellers alcoholic who do not have the permit. Seller of traditional alcoholic drinks sell traditional alcoholic drinks in stalls and on sidewalks Tuban district area. Municipal Police Units tuban regency is a law enforcement officer regional legislation in Tuban district. That is the background. The author chooses the location of the study and study at the Municipal Police Units in Tuban Regency. The formulation of the problem in this study is (1) how effectiveness of supervision and control for traditional alcohol seller “Tuak” based in 18 regulations Tuban distric Number 9 year 2016? (2) what the obstacles and solution of supervision and control for traditional alcohol seller “Tuak” based in 18 regulations Tuban distric Number 9 year 2016? The type of research used is juridical empirical, the approach used is a sociological juridical approach.

From the results of the study is known that the application of the number 9 year local regulation 2016 until now has not been effective. Based on the results of research in Municipal Police Units District Government of Tuban as the party in

charge of supervising and controlling the circulation of traditional alcohol "Tuak", from the Municipal Police Units side they never found a seller of traditional alcohol "Tuak" which have a SKPL-A Permit and also never follow up by giving administrative sanctions and criminal sanctions only provide warning letters.

Keywords: Tuak, Supervision and control.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ichsan Habiburohman

NIM : 145010100111097

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini/Legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya /data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 Desember 2018

Yang menyatakan,

Ichsan Habiburohman

NIM. 145010100111097

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu sejumlah dua ratus juta jiwa. Negara Indonesia sendiri memiliki beberapa tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pemenuhan tujuan negara diperlukan beberapa pembangunan negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan negara tersebut hal yang sangat dibutuhkan adalah mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan nasional, Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia perlu dipersiapkan sejak dini.

Dalam hal pembangunan ini yang dimaksud sumber daya manusia tidak hanya pemerintah saja yang secara langsung turut andil dalam proses pembangunan, melainkan masyarakat juga ikut dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan negara tersebut. Peran serta partisipasi rakyat sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan negara. Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama agar tujuan dan sasaran pembangunan tercapai sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Namun untuk mewujudkan suatu keadaan yang diharapkan yaitu terjalinnya hubungan kerjasama antara pemerintah dan rakyat tersebut, Negara Indonesia masih harus bergulat dengan beberapa masalah yang kurang mendukung akan menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan

perhatian serius dari Pemerintah adalah masalah peredaran minuman keras atau minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas baik remaja maupun kalangan dewasa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya akan disebut Perda Kabupaten Tuban tentang Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C^2H^5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C^2H^5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol (C^2H^5OH).”¹

Minuman tradisional di Kabupaten Tuban yang mengandung alkohol salah satunya adalah Tuak. Tuak adalah jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah.² Selain itu, Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma.³

Sebagai bagian dari alkohol, “tuak” adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang

¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 seri E nomor 21

² Local Wisdom, “Tradisi Nitik di Tuban”, Media Indonesia, Sabtu, 26 Maret 2011

³ “Bahas Ranperda Miras, Minuman “Tuak” Khas Tuban Terancam Punah”, Bangsa Online.com, 30 april 2018

berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, “tuak” ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol terdapat beberapa penjelasan tentang penggolongan dan standar mutu minuman beralkohol yang di bahas pada BAB V pasal 5, yang berbunyi:

- 1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %.
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 %.
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % sampai dengan 55 %.⁵
- 2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa minuman beralkohol yang dibuat dengan cara tradisional dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan.⁶

⁴ <http://arlintonhutagalung.blogspot.co.id/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html>, 30 april 2018

⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tambahan lembaran daerah kabupaten tuban tahun 2016 seri E nomor 21

⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tambahan lembaran daerah kabupaten tuban tahun 2016 seri E nomor 21

Masalah minuman keras sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat luas. Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol Inipun ditetapkan bahwa pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol di tempat umum, berdekatan dengan tempat beribadah, sekolah, rumah sakit dan lain-lain kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran. Namun saat ini banyak penjual yang tidak mengindahkan peraturan tersebut.⁷

Khususnya di Kabupaten Tuban, peredaran minuman berkadar alkohol di wilayah Kabupaten Tuban sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan penjualan Minuman Beralkohol. Walau sudah diatur dalam Perda tersebut namun kenyataannya peredaran minuman keras semakin hari semakin tidak dapat diatasi atau tidak dapat dikontrol. Sekarang ini banyak minuman berkadar alkohol yang beredar di pasaran tanpa melalui izin dari pihak yang berwenang.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan minuman keras maka resiko penyalahgunaan dari minuman keras semakin besar terjadi dikalangan masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat berpengaruh besar terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada penyimpangan dan pelanggaran, seperti membuat kekacauan di muka umum, membuat keributan, mengganggu ketenangan masyarakat, kebut-kebutan di jalan raya, dan hal-hal lain yang mengganggu ketertiban umum. Maraknya gangguan

⁷ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tambahan lembaran daerah kabupaten tuban tahun 2016 seri E nomor 21

stabilitas keamanan yang sering terjadi di Kabupaten Tuban, pada umumnya juga didominasi oleh minuman beralkohol.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas kewajaran jumlah konsumsi, akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu juga dapat menjadi masalah bagi orang lain. Mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi pengonsumsi minuman keras itu sendiri. Dampak lain bagi orang lain adalah, biasanya orang yang mengkonsumsi minuman keras dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi antisosial dan cenderung merugikan orang lain.

Saat ini penggunaan minuman keras sangat merajalela. Gejala ini dapat dilihat dari semakin maraknya penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat umum seperti cafe, pub, restoran, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Dengan banyaknya penjual yang menjual minuman beralkohol tersebut membuat semakin meluasnya juga konsumen minuman keras tersebut karena mudah sekali didapatkan. Selain di tempat-tempat yang telah disebutkan, biasanya minuman beralkohol juga dapat dibeli di toko jamu, warung remang-remang, bahkan di toko sembako.

Penyebaran minuman keras di Kabupaten Tuban sudah tidak dapat dikontrol atau dikendalikan lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak memandang batasan usia pengonsumsi minuman keras serta dikawatirkan akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Penyebaran minuman keras yang semakin marak dilatarbelakangi oleh penjual di tempat dan atau pengecer minuman keras. Para penjual dan atau pengecer ini sayangnya tidak dilengkapi

izin terkait dengan usaha yang dijalankannya. Sebenarnya izin sangat penting dalam pelaksanaan suatu usaha. Menurut Sri Pudyatmoko, “perizinan merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan perundang-undangan”.⁸

Sedangkan menurut Sjchran Basah izin adalah “perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan”.⁹ Berdasarkan penjelasan pengertian perizinan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya perizinan adalah suatu perbuatan yang dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut perlu diajukannya suatu permohonan kepada pemerintah dan apabila permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang maka perbuatan itu boleh dilakukan.

Sebagai suatu bentuk kebijakan, tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma di dalam masyarakat kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan peri kehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dapat terlaksana.¹⁰

⁸ Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Jakarta, PT.Gramedia, 2009, hlm. 8

⁹ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 152

¹⁰ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa izin tidak boleh melanggar undang-undang, sedangkan penjualan minuman beralkohol telah jelas diatur dalam undang-undang dan dilarang dalam undang-undang. Bahkan penjual dan atau pengecer dalam praktek usahanya tidak dilengkapi dengan izin usaha penjualan minuman beralkohol. Hal itu merupakan sebuah pelanggaran terkait dengan penjualan ilegal atau tanpa izin.

Penjualan minuman beralkohol sangatlah ditentang dalam beberapa peraturan, hal itu karena dirasa minuman beralkohol tidak memberikan manfaat yang baik bagi manusia melainkan malah berdampak buruk. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 telah menerangkan bahwa

“setiap orang atau badan dilarang, memproduksi segala jenis minuman beralkohol di Daerah kecuali telah mendapat izin dari Bupati, melarang menjual minuman beralkohol secara eceran di minimarket, melarang mengkonsumsi jenis minuman beralkohol di luar tempat, melarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media cetak maupun elektronik, dan media luar ruang”.¹¹

Selanjutnya apabila ada dugaan pelanggaran diatas maka dapat dilakukan pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pengendalian dan pengawasan tersebut sampai saat ini dirasa kurang terlaksana dengan baik karena saat ini semakin banyak tempat-tempat yang menjual minuman-minuman tradisional beralkohol “Tuak”.

¹¹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tambahan lembaran daerah kabupaten tuban tahun 2016 seri E nomor 21

Perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah dalam menanggulangi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol ini agar tidak semakin meresahkan rakyat. Kurangnya kesadaran dari pelaku baik itu penjual dan pembeli atau pengkonsumsi minuman beralkohol berakibat susah ditegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 ini.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dalam hal ini akan membahas tentang **“Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Bagi Penjual Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016”**.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Faktor Pembeda	Satrio Wibowo (095010110232) Universitas Brawijaya	Cynthia grahady (11501010111032) Universitas Brawijaya	Ichsan Habiburohman (145010100111097) Universitas Brawijaya
Judul	Implementasi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh	Optimalisasi Pengawasan Pemerintahan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kios- Kios di Kota Malang	Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 (Studi di Sapol PP Kabupaten Tuban)

	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung		
Rumusan Masalah	<p>-Bagaimana implementasi pasal 13 ayat (1) Perda Kab.Tulungagung No.4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan ?</p> <p>-Apa hambatan yang dihadapi oleh dinas perdagangan dan perindustrian kab.tulungagung dalam implementasi pasal 13 ayat (1) Perda Kab.tulungagung No.4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan</p>	<p>-Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan satuan polisi pamong praja dalam mengontrol pelaksanaan izin tempat penjualan minuman beralkohol di kios-kios di kota malang ?</p> <p>-Apa saja hambatan terhadap pengawasan izin tempat penjualan minuman beralkohol dan bagaimana optimalisasi dalam</p>	<p>-Bagaimana Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 ?</p> <p>-Apa saja hambatan serta solusi dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 ?</p>

	pengawasan peredaran minuman beralkohol serta solusi yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan?	pengawasan izin minuman beralkohol di kota malang sesuai dengan perda kota malang no 5 tahun 2006 ?	
--	---	---	--

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui perbedaan dengan skripsi Satrio Wibowo dengan penulis yaitu peraturan daerah yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan skripsi Satrio Wibowo dengan penulis adalah objek yang diteliti yaitu minuman beralkohol. Perbedaan dengan skripsi Chintya Grahady Puteri dengan penulis adalah peraturan daerah yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan skripsi Chintya Grahady Puteri dengan penulis adalah objek yang diteliti yaitu minuman beralkohol.

Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian dan dilaksanakan dengan mengambil Judul **“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL “TUAK” BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016”** (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut, dan dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 ?
2. Apa saja hambatan serta solusi dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis proses Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dan mengetahui solusi dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban berdasarkan Perda Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari penulisan penelitian ini adalah untuk menguraikan kegunaan yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman sebagai akademisi dalam hal Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hasil bagi peneliti bahwa pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan sanksi berupa surat pernyataan kepada penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” tanpa adanya tindakan lanjut pemberian sanksi denda dan sanksi pidana di pengadilan.

Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan referensi bagi penulisan ilmiah, selain itu juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hasilnya bahwa pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi berupa surat peringatan bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak”.

Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tambahan wacana, serta wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi negara mengenai Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016. Hasilnya bahwa pengendalian dan pengawasan yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban hanya memberikan sanksi berupa surat peringatan bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak”.

2. Manfaat Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum

Menjadi pengetahuan agar Pengendalian dan Pengawasan serta pelarangan penjualan minuman tradisional beralkohol di Kabupaten Tuban dapat teratasi dengan baik dan kinerja dari aparat penegak hukum lebih ditingkatkan.

Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan sebagai penambah wawasan terkait bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagi Penjual

Menjadi pengetahuan bagi penjual minuman tradisional beralkohol, bahwa minuman beralkohol itu ada aturan hukumnya yaitu peraturan daerah. Dalam hal ini penjual yang berada di wilayah Kabupaten Tuban berarti aturan yang mengatur penjual minuman beralkohol adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016. Bahwa untuk menjual minuman beralkohol harus mempunyai izin dari pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I dijelaskan mengenai :

Penulisan judul, latar belakang yaitu alasan yang membantu penulis menulis karya tulis ilmiah ini. Rumusan permasalahan merupakan permasalahan pokok yang akan diteliti penulis dalam penyempurnaan karya tulis ini. Tujuan permasalahan adalah jawaban atas rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam karya tulis ilmiah ini. Manfaat penulisan merupakan manfaat yang dapat diperoleh setelah membaca karya tulis ini yang sarannya ada beberapa lapisan, sebagai contoh seperti manfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pegawai negeri, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Sistematika penulisan merupakan tata urutan penulisan karya tulis ini. Orientasi penulisan atau keaslian penulisan yaitu untuk membuktikan bahwa karya tulis ini asli ditulis oleh penulis dan akan dibandingkan dengan karya tulis orang lain yang mempunyai sedikit kemiripan tentang tema yang diangkat penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan mengenai pustaka-pustaka yang menjadi dasar untuk menganalisis hasil penelitian. Pustaka yang dimaksud meliputi pengertian dari Minuman Beralkohol termasuk Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak”, Pengawasan, Pengendalian, Penjual, Izin, dll.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III menjelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian ini, mengemukakan hasil penelitian serta analisis dari hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah berdasarkan suatu metode di bawah ini :

1. Jenis penelitian
2. Lokasi penelitian
3. Pendekatan penelitian

4. Jenis dan sumber data
5. Teknik memperoleh data
6. Populasi dan sampel
7. Teknik analisis data
8. Definisi operasional

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV dipaparkan mengenai deskripsi obyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dalam karya tulis ilmiah ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan dan Pemberian Sanksi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan terkait dengan penjualan minuman beralkohol, tak luput juga dengan sanksi yang diberikan pemerintah bagi penjual minuman beralkohol. Penulis juga membahas hambatan aparat pemerintah Kabupaten Tuban yang turut mengawasi dan mengendalikan penjual minuman beralkohol tak luput juga dengan solusi bagaimana pemerintah mengatasi hambatan tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun untuk instansi pemerintah terkait dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efek atau dampaknya (akibat, pengaruh, kesan); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).

Efektifitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.¹² Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penggunaan hukum lima hal, yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan¹³.

Berhubungan dengan uraian diatas dikemukakan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

¹² Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 7

¹³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Apabila masyarakat menaati peraturan maka dapat dikatakan peraturan hukum tersebut berjalan efektif, namun apabila tidak maka hal tersebut dapat dikatakan hukum tidak berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁴ *ibid*, hlm. 8

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktulasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.

Penegakan hukum merupakan perbuatan penanggulangan dengan upaya paksa, melalui proses pidana, pemberian sanksi yang berbentuk administratif. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menjelaskan tentang penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten tuban dalam memberikan sanksi administratif bagi penjual atau pengecer yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap pengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (1), pasal 12 dan/atau pasal 13 dikenakan sanksi administratif
2. Sanksi tersebut berupa
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. Denda administratif paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Adanya sanksi yang begitu tegas kiranya dapat membuat peraturan hukum berjalan dengan maksud dan tujuan dibuatnya peraturan daerah ini. Efektifitas hukum dapat dilihat dari tercapainya maksud dan tujuan tersebut, apakah masih ada saja yang melanggar peraturan ataukah masih banyak yang tidak tahu adanya peraturan hukum.

Penerapan hukum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol melibatkan instansi-instansi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol.

B. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengertian pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan atau yang didalam bahasa inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana¹⁵. Dalam hukum administrasi, dikemukakan oleh J.B.J.M ten Berge bahwa pengawasan merupakan bagian yang penting dalam penegakan hukum administrasi (*administrative rechthandhaving*). Pengawasan merupakan penegakan hukum preventive yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma administratif¹⁶. Istilah pengawasan dalam bahasa indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan adalah kegiatan mengawasi

¹⁵ Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 27

¹⁶ *Ibid.* hlm. 28

saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan diluar itu, kecuali melaporkan hasil yang diawasi¹⁷.

Namun dalam kenyataan sehari-hari pengawasan juga mengandung arti yang luas yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan, mengawasi juga mempunyai makna pengendalian sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain itu pengawasan juga dapat diartikan sebagai berikut¹⁸ :

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2. Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah dalam negeri dan gubernur atau bupati atau walikota madya kepala daerah sebagai wakil pemerintah di daerah bersangkutan.

a. Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu :

- 1) Menteri dalam negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat satu
- 2) Gubernur kepala daerah bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat dua.

¹⁷ Beny Ari Gunawan, **Optimalisasi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan**, skripsi tidak diterbitkan, fakultas hukum, universitas brawijaya, 2012

¹⁸ Beny Ari Gunawan, loc.cit

- b. Pengawasan represif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang¹⁹.

Sedangkan menurut Syahrir Yasin Limpo, pengawasan sebagai instrumen organisasi mempunyai banyak klasifikasinya, sebagai berikut²⁰ : pengawasan intern dan pengawasan ekstern yang dikelompokkan berdasarkan hubungan antara pengawas dengan yang diawasi.

- a. Pengawasan intern

Pengawasan yang ada di dalam unit organisasi yang bersangkutan yang dilakukan oleh badan atau orang serta dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jendral dalam setiap kementrian.

- b. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang berada di luar unit organisasi²¹.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan

¹⁹ C.S.T Kansil, **Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 129-131

²⁰ Syahrul Yasin Limpo, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan pengawasan Fungsional Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**, Desertasi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2007, hlm. 110-117

²¹ Satrio Wibowo, **Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012

internal)²². Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKB), Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Daerah, atau oleh atasan langsung dari pejabat pemerintah²³.

C. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol, kamus besar bahasa Indonesia mengartikan alkohol adalah sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman, sehingga dapat diartikan minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan²⁴.

Sedangkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 menjelaskan minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol (C^2H^5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi maupun fermentasi tanpa destilasi, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu maupun tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur

²² Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi**, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 201

²³ Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 32

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 42

konsentrat ethanol (C^2H^5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C^2H^5OH).”²⁵

2. Jenis-jenis golongan Minuman Beralkohol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 1% sampai dengan 5%
- b. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 5% sampai dengan 20%
- c. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 20% sampai dengan 55%.²⁶

3. Dampak dari Minuman Beralkohol

Seringkali kita mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa kriminal ataupun peristiwa yang tragis yang dialami oleh orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol baik lewat media cetak ataupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah seperti tawuran, pemerkosaan, perampasan, penganiayaan, dan lain-lain sedangkan peristiwa yang tragis adalah kecelakaan lalu lintas oleh orang yang telah mengonsumsi minuman beralkohol.

²⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 seri E nomor 21

²⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 seri E nomor 21

Dalam kehidupan modern ini minuman beralkohol berperan dalam kehidupan bersosial, karena dengan meminum minuman beralkohol biasanya orang merasa keren atau bahkan merasa jantan. Dalam pergaulan remaja yang selalu merasa condong kepada negara-negara Eropa atau negara Amerika. Di negara-negara seperti Eropa dan Amerika memang sangat lazim dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Itulah yang menjadi bahan tiruan dari para masyarakat tanpa peduli apapun resikonya.

Efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat merugikan, sama halnya dengan efek dari psikotropika yang bermula menimbulkan rasa menyenangkan namun berdampak pada mental, dan alkohol merusak beberapa sistem atau organ-organ vital dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya seperti organ hati, lambung, otak, usus, dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Tuak

“Tuak” adalah jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah.²⁷ Selain itu, Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma.²⁸

Sebagai bagian dari alkohol, “tuak” adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, “tuak” ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan-

²⁷ Local Wisdom, “Tradisi Nitik di Tuban”, Media Indonesia, , Sabtu, 26 Maret 2011

²⁸ “Bahas Ranperda Miras, Minuman “Tuak” Khas Tuban Terancam Punah”, Bangsa Online.com, 30 april 2018

rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.²⁹

“Tuak” merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau ental, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya.³⁰

Di kabupaten Tuban ada seorang pedagang yang dapat membuat “Tuak” buatan. Cara membuat “Tuak” menurut penduduk Tasikmadu dalam artikelnya adalah sebagai berikut, 30 liter tuak buatan tersebut dibuat dari Tuak lama sebanyak 10 liter, Tuak baru 5 liter, Air 15 liter, ditambah secukupnya sari manis, untuk rasa “sepet” menggunakan Duwet atau Juwet dan rasa pahit dengan menggunakan sambiloto. Kadang-kadang sari manis tidak digunakan. Tuak lama adalah tuak yang memang disimpan dalam waktu yang sudah lama. Tuak lama biasanya kandungan alkoholnya agak tinggi. Tuak baru memang dimaksudkan untuk menjaga aroma dan rasa tuak buatan. Buah juwet yang kelat atau “sepet” dan sambiloto yang pahit memberi kesan sepet pahitnya rasa tuak.³¹

Untuk membuat “Tuak” murni yakni proses pembuatannya hampir sama dengan pembuatan minuman legen. Pucuk bunga siwalan diiris secara

²⁹ <http://arlintonhutagalung.blogspot.co.id/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html>, 30 april 2018

³⁰ Sukma Mardiyah Panggabean, “Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 21.

³¹ Wong Tasik Madu, “Cara Membuat Toak Tuban”, <http://kota-tuban.blogspot.co.id/2012/07/caramembuat-toak-tuban.html> diakses tanggal 30 april 2018.

tipis dan getah yang keluar ditampung pada “bumbung” wadah terbuat dari ruas bambu panjang 40-50 cm. Bila pada pembuatan legen, bumbung itu harus dicuci bersih, untuk membuat tuak ini bumbung justru tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran yang melekat pada bumbung itulah yang berpengaruh pada proses fermentasi pada air nira sehingga menjadi tuak. Beberapa pembuat tuak ada yang menambahkan irisan kulit pohon dari tanaman jambu, juwet atau jamblang, mengkudu atau pace dan sebagainya.³²

Cara minum “Tuak” pun tergolong unik, karena di sajikan dengan centhak, gelas yang terbuat dari bambu. Untuk urusan rasa, “Tuak” Tuban sedikit masam, ada juga yang pahit. Sebagaimana hasil fermentasi lain, “Tuak” Tuban juga mengandung alkohol. Terlalu banyak mengkonsumsi “Tuak” bisa membuat orang mabuk. Dulu pedagang “Tuak” di Tuban berjualan menggunakan ongkek atau pikulan yang terbuat dari bambu, tetapi sekarang sudah tidak terlihat lagi pedagang “Tuak” yang menggunakan ongkek. Sebotol “Tuak” dijual seharga Rp 3.000. Para pedagang biasanya sudah mulai berjualan sejak pagi, dan hingga larut malam pun masih bisa ditemui.³³

Kabupaten Tuban memiliki beberapa minuman khas yakni Legen dan “Tuak”. Cara pembuatan Legen dan “Tuak” sama-sama berfermentasi, akan tetapi kalau “Tuak” fermentasinya mengandung alkohol sedangkan Legen tidak mengandung alkohol. Menjadi “Tuak” yang beralkohol, karena di dalam “bethak” diberi media tumbuhnya jamur yang oleh orang Tuban disebut “jatu”.

³² Curva Green, “Budaya Minum Tuak di Kota Tuban”, <http://curvagreen.blogspot.co.id/2013/09/budaya-minum-toak-di-kota-tuban.html>, diakses 30 april 2018

³³ Krina Indah Puspitasari, “Seputar Kota Tuban”, <http://Catatan Nana SEPUTAR KOTA TUBAN> (Kota KelahiranKu), diakses tanggal 30 april 2018

“Jatu” ini biasanya terbuat dari kulit pepohonan yang dikeringkan, ditumbuk dan dipotong-potong. Selanjutnya dimasukkan ke “bethek” ketika hendak menyadap. Ketika cairan menetes ke “bethek” bercampur dengan “jatu”, maka terjadilah fermentasi dan terjadilah “Tuak”. Bahkan untuk menghasilkan rasa yang pahit atau warnanya menjadi merah biasanya dicampurkan irisan kulit (babakan) pohon Juwet.³⁴

Dalam satu hari dilakukan penyadapan dua kali pagi dan sore hari. Proses fermentasi ini terus berlangsung ketika Legen atau “Tuak” diambil dari pohon yang akan merubah rasa dan aromanya. Biasanya “Tuak” dan Legen yang asli hanya memiliki masa layak minum 4 sampai 5 jam setelah penyadapan karena fermentasi yang terus berlangsung.

Walaupun “Tuak” mengandung alkohol namun kadar yang dimiliki tidaklah terlalu tinggi, itulah sebabnya bagi sebagian masyarakat Tuban minuman “Tuak” biasa dijadikan sebagai teman ngobrol atau biasa disebut dengan “kongkow” diwarung-warung tradisional. Akan tetapi kalau kebanyakan tetap saja bisa memabukkan.³⁵

Namun dibalik aspek negatif yang dimiliki “Tuak”, terdapat manfaat yang besar dari toak atau adanya sisi positif yaitu sebagai obat atau penambah stamina tubuh, selain juga bisa menyembuhkan orang yang terkena sakit kencing batu. “Tuak” dapat menjadi obat penawar dari pada obat yang lain dan operasi. Cukup dengan minum toak satu gelas besar dua kali sehari sudah dapat melancarkan buang air kecil dan melarutkan batu-batu kapur dalam ginjal.

³⁴ P-Nus, “Legen dan Tuak Tuban”, <http://PNus-Legen-dan-Tuak-Tuban>, diakses tanggal 30 April 2018

³⁵ Paring Waluyo Utomo, “Tradisi Tuak dan Perempuan Tuban”, <http://tradisi-tuak-dan-peranperempuan-tuban-srinthil>, diakses tanggal 30 April 2018.

E. Tinjauan Umum Penjual Minuman Beralkohol

Dalam peraturan daerah kabupaten tuban tentang minuman beralkohol telah diatur beberapa pengertian tentang penjual dan atau pengecer. Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tersebut menjelaskan bahwa pengertian penjualan minuman beralkohol adalah Kegiatan memperdagangkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.³⁶ Penjualan minuman beralkohol dapat dibagi berdasarkan waktu konsumsinya yaitu konsumsi langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud konsumsi secara langsung adalah penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual tersebut yang langsung diminum di tempat yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan waktu konsumsi yang tidak langsung adalah pengkonsumsian yang tidak langsung diminum di tempat penjual minuman beralkohol tersebut.

Penjual yang dimaksudkan disini berupa usaha yang di dalam praktik usahanya menjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang termasuk minuman beralkohol golongan yang terendah yaitu golongan A dengan kadar ethanolsampai dengan 5%.

F. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian perizinan

Menurut N.M Splet dan J.B.JM Ten Berge Perizinan adalah istilah izin dalam arti luas sedangkan izin dalam arti sempit disebut “izin” saja. Izin (dalam arti sempit) lebih lanjut dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainnya seperti dispensasi, konsensi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan dan

³⁶ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 seri E nomor 21

pendaftaran³⁷. Sedangkan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan perizinan dapat berbentuk pendaftaran rekomendasi sertifikasi penentuan kuota, dan izin melakukan suatu usaha³⁸. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan³⁹.

Menurut Helmi objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Artinya perbuatan yang menjadi objek tersebut perlu diatur untuk ketertiban⁴⁰. Sifat dari suatu izin adalah prefentif karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin⁴¹. Pada dasarnya pemerintah memiliki tugas mengatur, dimana dalam hal ini salah satunya dalam bentuk penerbitan izin. Sehingga adrian berkesimpulan bahwa izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan⁴².

³⁷ N.M Splet dan J.B.J.M Ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, Disunting Oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 1-2

³⁸ Tatiek Sri Djatmiati, **Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia**, Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, yang dikutip oleh Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 26

³⁹ N.M Splet dan J.B.J.M Ten Berge, Ibid, Yang Dikutip Oleh Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

⁴⁰ Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28

⁴¹ Imade Aria Utama, **Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan Di Wilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Bali)**, Desertasi, Program Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 2006, yang dikutip oleh Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 27

⁴² Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 181

Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 angka 8, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah maupun peraturan lain sebagai bukti legalitas, menentukan sah atau tidaknya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya angka 9, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau dalam daftar usaha⁴³.

2. Sifat izin

Izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut⁴⁴:

- a. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang terbitnya tidak tergantung pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin serta dalam memutuskan pemberian izin mempunyai kebebasan yang sangat besar.
- b. izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis. Kebebasan organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
- c. izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.
- d. izin yang bersifat memberatkan, yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Pasal 1 Angka 8 dan 9

⁴⁴ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010hl, hlm. 173

- e. izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. izin yang bersifat pribadi, yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan memohon izin.
- h. izin yang bersifat kebendaan, yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang seharusnya dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang⁴⁵.

3. Macam-macam perizinan

- a. Izin Mendirikan Bangunan
- b. izin merobohkan bangunan atau izin penghapusan bangunan
- c. izin gangguan (HO)
- d. izin lokasi
- e. izin tanda daftar perusahaan
- f. izin usaha jasa konstruksi
- g. surat izin usaha perdagangan
- h. surat izin tempat usaha
- i. izin layak bumi
- j. izin pemakaian tanah
- k. izin sewa sempadan
- l. izin reklame.

⁴⁵Ibid, hlm. 200

4. Bentuk dan isi izin

Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai ketetapan yang tertulis secara umum izin memuat :

- a. kewenangan lembaga
- b. pencantuman alamat
- c. substansi dalam diktum
- d. persyaratan
- e. penggunaan alasan
- f. penambahan substansi

5. Fungsi izin

Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan berikut :

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan intensif bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

Instrumen yang manfaatnya sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebut perizinan. Maka perizinan hanya dimasukkan sebagai sumber income daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan. pada sisi yang lain jika prosedur dilakukan dengan cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. pemberian lisensi serta izin kepada masyarakat yang hanya dapat dilakukan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.

c. Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan yaitu menjadi instrumen peraturan tindakan dan perilaku masyarakat. Kecuali dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat.

6. Tujuan pemberian izin

Tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah

untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan Dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

dengan permintaan permohonan izin, maka secara otomatis pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

c. Dari sisi masyarakat

dari sisi masyarakat tujuan pemberi izin itu adalah sebagai berikut :

1. untuk adanya kepastian hukum

2. untuk adanya kepastian hak
3. untuk memudahkan mendapatkan fasilitas apabila pembangunan yang didirikan telah memiliki izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

7. Prosedur Penerbitan Izin

a. Permohonan

izin merupakan sebuah keputusan pemerintah atau menurut undang-undang tentang peradilan tata usaha negara (PTUN) disebut sebagai keputusan tata usaha negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu mesti ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. sebagai sebuah keputusan dari sebuah badan atau pejabat yang berwenang, izin lain melalui serangkaian proses, yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadangkala begitu panjang.

b. Penelitian persyaratan dan peran serta

hal ini merupakan hal yang penting dari tahapan pemrosesan izin kecermatan, kematangan dan kehati-hatian memang perlu digunakan Meskipun tidak sampai berlebihan. perlu diingat bahwa prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. sekali keputusan keluar itu maka dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang seringkali cukup banyak.

c. Pengambilan keputusan

izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan, sebelum izin keluar tentu ada dua kemungkinan keputusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti

izin diterbitkan dan yang kedua permohonan tidak dikabulkan yang berarti izin tidak diterbitkan. proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan tidak dengan seketika melainkan melalui serangkaian proses. Pengambilan keputusan izin kadangkala juga tidak murni sengaja keputusan salah satu pihak saja melainkan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan. kiranya dapat dibayangkan proses yang dilalui untuk permohonan surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten.

d. Penyampaian izin

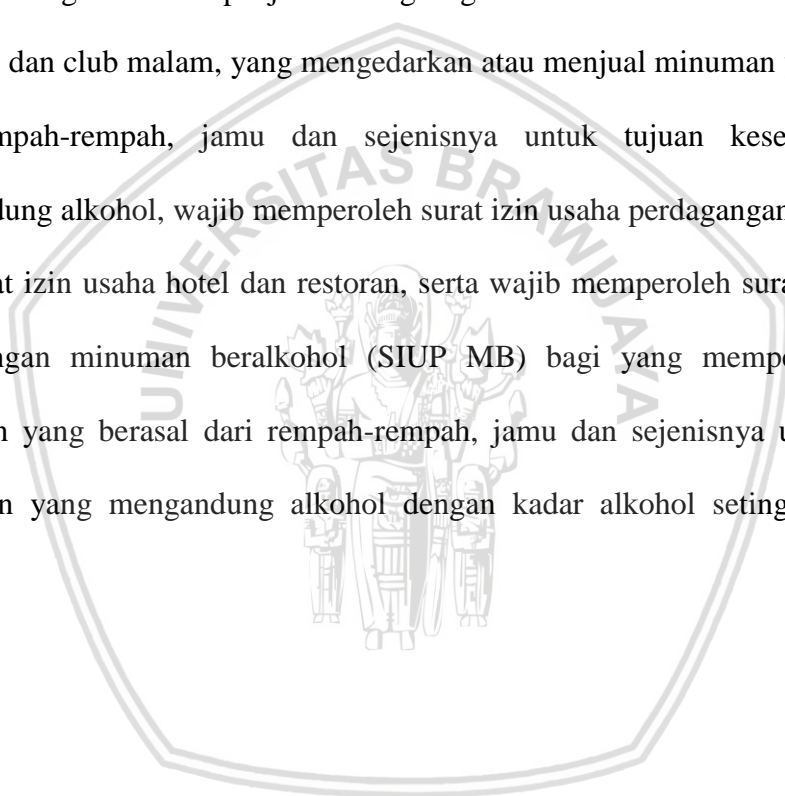
Apabila proses penanganan izin telah selesai, pejabat yang berwenang menandatangani izin tersebut kemudian selanjutnya adalah penyampaian izin. penyampaian izin dilakukan dengan cara, misalnya melalui penyampaian langsung untuk SIM, misalnya pemohon cukup menerima izin tersebut langsung ke tempat kepengurusan karena biasanya setelah pemohon mengajukan permohonan langsung dilakukan pengujian baik tertulis atau lisan.

8. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah izin suatu usaha yang dilakukan oleh pengusaha tertentu untuk dapat melakukan perdagangan minuman beralkohol. Perdagangan minuman beralkohol baik orang atau perusahaan yang turut dalam memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk minuman beralkohol dengan golongan A dan wajib mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang diperdagangkan.

Perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk serta diminum langsung ditempat wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) yang diterbitkan oleh bupati. Dalam persyaratan penerbitan SIUP MB untuk bar, pub dan club malam wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

Sedangkan untuk penjualan langsung diminum termasuk hotel, restoran, bar, pub, dan club malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin usaha hotel dan restoran, serta wajib memperoleh surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15%.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode ini menggunakan penelitian yuridis empiris karena cara yang digunakan didalam penelitian ini adalah meneliti bahas pustaka dan terjun langsung ke instansi yang terkait dalam hal ini penulis meneliti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengertian dari penelitian yuridis empiris itu sendiri adalah penelitian dengan menggambarkan tentang kondisi keadaan subyek dan obyek penelitian dan melakukan observasi langsung di lapangan terkait bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan atau permasalahan yang ada. Mengenai judul efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” berdasarkan pasal 18 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat⁴⁶. Pendekatan

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155

yuridis yang dimaksud adalah meneliti dengan cara pendekatan dari segi ilmu hukum, dimana sisi yuridis atau ilmu hukum untuk menganalisis pengawasan serta sanksi bagi penjual minuman beralkohol. Sedangkan pendekatan sosiologisnya adalah upaya kritis menjawab permasalahan dengan memandang kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya.

C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Tuban dilakukan penelitian terhadap efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” berdasarkan pasal 18 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Dipilihnya lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban karena Satpol PP merupakan pihak yang terjun langsung dalam pemberian pengawasan dan pengendalian. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota yang terkenal dengan minuman khasnya yaitu minuman tradisional beralkohol rendah “Tuak” dan budaya masyarakat di Kabupaten Tuban yang masih kental meminum minuman tradisional beralkohol “Tuak” setiap harinya.

D. Sumber Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka peneliti memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan melalui beberapa sumber data sebagai berikut, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian yang terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data ini, maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, antara lain dengan teknik:

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab serta bebas namun tetap terarah, maksudnya dalam melakukan wawancara, penelitian tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan narasumber Bpk.Wadiono,S.H.

b. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan-catatan, arsip-arsip, dan kumpulan peraturan perundang-undangan, serta laporan-laporan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan objek yang diteliti⁴⁷.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan sebagai populasi

⁴⁷ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119

adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selain instansi daerah populasi lain dari karya tulis ini adalah penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu⁴⁸. Purposive sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal yang akan diteliti penulis yang dapat dikatakan sampel adalah unit penegakkan perundang-undangan di daerah karena berwenang untuk melakukan eksekusi terkait adanya pelanggaran yang berhubungan dengan perundang-undangan daerah yaitu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Wadiono,S.H.,M.Hum merupakan sampel dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Selain instansi daerah sampel juga didapat dari tempat yang menjual minuman beralkohol tradisional “Tuak” yaitu Bapak Rasdam, Bapak Witanto sebagai sampel pengkonsumsi “Tuak” atau peminum, serta Bpk.Ahmad Hasyim tokoh masyarakat (tokoh agama) di Kabupaten Tuban.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan melalui pemikiran logis, baik secara induktif deduktif, analogi, maupun

⁴⁸ *Ibid.*

komparatif dengan tujuan untuk memperoleh tentang keterangan atau informasi dari objek yang diteliti. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara narasumber atau informan.

H. Definisi Oprasional

Definisi oprasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

- a. Minuman keras adalah minuman yang didalamnya terkandung zat ethanol atau yang didalamnya terdapat kandungan alkohol yang apabila di konsumsi dapat menimbulkan gangguan kesadaran (mabuk).
- b. Tuak adalah minuman tradisional yang mengandung alkohol rendah tetapi dapat memabukkan yang tergolong dalam golongan A sampai dengan 5% yang berasal dari tanaman lontar.
- c. Oplosan adalah jenis minuman lokal yang mengandung alkohol yang tidak disertai label dan tidak ada izin dalam pembuatannya.
- d. Pengawasan adalah upaya dan usaha preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan yang diatur oleh undang-undang.
- e. Penjual adalah orang yang menjual barang tertentu untuk mendapatkan uang.

- f. Izin adalah bentuk keputusan pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan.
- g. Izin penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pemohon izin agar dapat menjual minuman beralkohol.
- h. Sanksi adalah bentuk hukuman dari pelanggaran yang telah dilakukan.
- i. Sanksi administratif adalah hukuman administrasi terhadap pelaku usaha tertentu yang melanggar peraturan perundang-undangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

a. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban

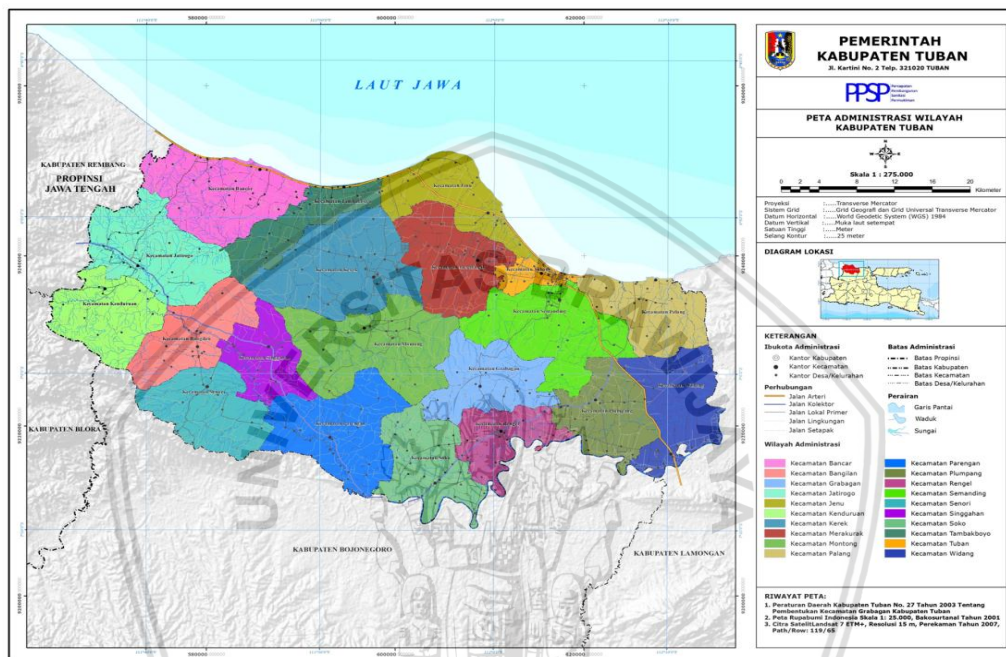
Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km². Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111° 30' - 112° 35' BT dan 6° 40' - 7° 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0 - 500 mdpl. Bisa dikatakan bahwa Tuban memiliki Lokasi Yang Strategis karena berada di jalur Pantura dan berdekatan dengan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Maka, tak heran pada masa dulu kabupaten Tuban dijadikan pelabuhan utama oleh armada kerajaan Majapahit dan sebagai penyebaran agama Islam oleh Wali Songo.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada di 19 kecamatan, sedangkan yang beriklim agak basah berada pada 1 kecamatan. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan pada deretan pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara di Tuban terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan Widang, dan dari Kecamatan Merakurak sampai Kecamatan Soko.

Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 m dpl yang berada di Jalur Pantura dan titik tertinggi 500 m yang berada di Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo menuju Gresik.⁴⁹

Gambar 1

Peta Wilayah Kabupaten Tuban



b. Keadaan Demografi Kabupaten Tuban

Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 330 desa atau kelurahan kelurahan yakni :

⁴⁹ www.tubancity.com/letak-kota-tuban-jawa-timur.html, diakses pada 17 juli 2018 pukul 13.30 WIB

Tabel 2

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa
1	Kenduruan	9
2	Bangilan	14
3	Senori	12
4	Singahan	12
5	Montong	13
6	Parengan	18
7	Soko	23
8	Rengel	18
9	Grabangan	11
10	Plumpang	18
11	Widang	16
12	Palang	19
13	Semanding	17
14	Tuban	17
15	Jenu	17
16	Merakurak	19
17	Kerek	17
18	Tambakboyo	18
19	Jatirogo	18
20	Bancar	24
	Jumlah	330

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah penduduk di Kabupaten Tuban pada tahun 2015 adalah 1.258.816 dengan komposisi laki-laki 630.576 dan perempuan 628.240. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Semanding dengan jumlah 112.703 sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan

Kenduruan yaitu 30.413. Kepadatan penduduk terdapat di Kecamatan Tuban dengan kepadatan 4.297 jiwa/km².⁵⁰

Kecamatan Semanding di masukkan dalam kategori Kecamatan yang paling banyak memproduksi Tuak dan Arak sebagai mata pencaharian penduduk setempat. “Tuak tersebut dapat di kirim ke daerah Kecamatan lain termasuk ke Kecamatan Jenu dan Kecamatan Tuban.”⁵¹

c. Julukan bagi Kabupaten Tuban

Disebut sebagai Bumi Wali karena dahulu kabupaten Tuban dijadikan tempat penyebaran agama Islam oleh para Wali, baik yang termasuk Wali Songo seperti Sunan Bonang maupun yang tidak terkategori Wali Songo seperti Sunan Bejagung. Lalu, ada kalangan lain yang menyebut kota Tuban sebagai “Kota Tuak” karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman (tuak & legen) yang berasal dari sari bunga siwalan (ental).

Juga ada julukan Kota Seribu Goa, yang diiberikan kepada Kota Tuban karena kondisi geografis dari Kota Tuban ini di kelilingi oleh gunung kapur yang membentuk sebuah goa, bahkan ada juga yang memiliki stalaktit dan Stalakmit. Beberapa goa yang terkenal adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, dan sebagainya.

Julukan lain adalah Kota Koes Plus. Salah satu Group Band Kondang asal Tuban yang sempat dipenjara karena mewakili unsur aliran politik kapitalis, pada masa pemerintahan Ir.Soekarno yang sedang gencarnya gerakan anti kapitalis.

⁵⁰ ppsp.nawasis.info/.../kab.tuban, diakses pada 17 juli 2018 pukul 13.30 WIB

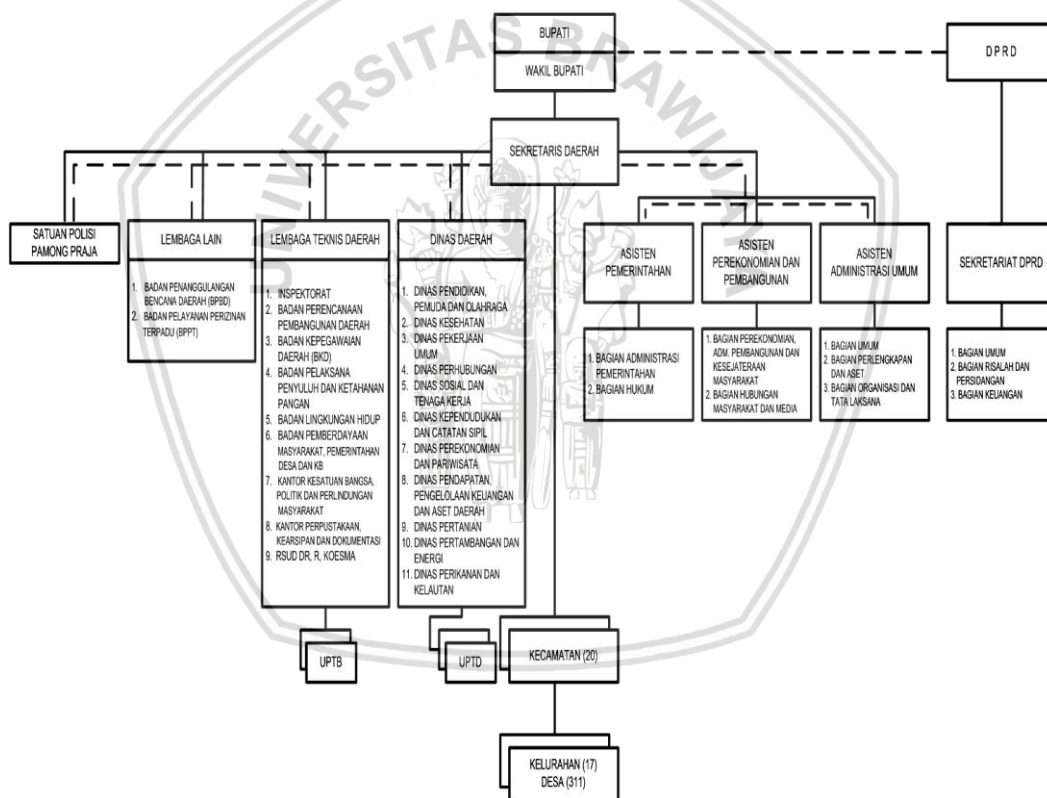
⁵¹ Data primer hasil wawancara dengan Bapak Wadiono,S.H.,M.Hum

Disebut Juga Bumi Ronggolawe, karena Ronggolawe adalah pahlawan besar Kota Tuban.⁵²

Atas dasar sebutan Kota Tuak Penulis tertarik untuk meneliti tentang minuman tradisional yang menjadi khas dari Kabupaten Tuban yang melalui beberapa informasi dari warga setempat yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Tuban

Tabel 3



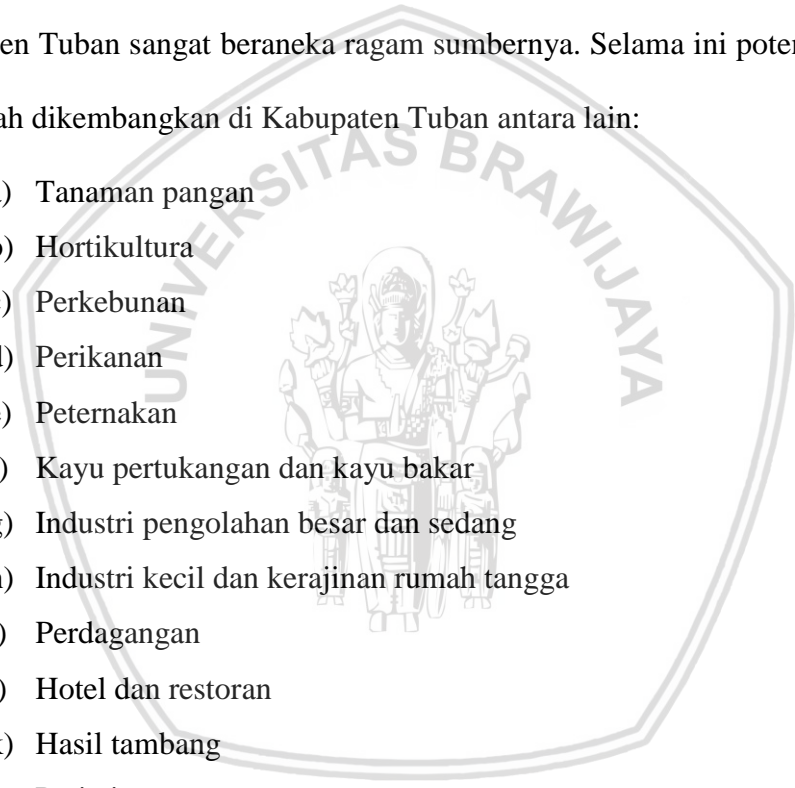
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten tuban kedudukannya di dalam organisasi pemerintahan kabupaten tuban adalah di bawah perintah bupati dan yang menjalankan beberapa

⁵² <https://tarunakompetisi18.blogspot.com/2017/05/profil-lengkap-kabupaten-tuban.html> diakses pada 17 juli 2018, 13.50 WIB

peraturan bupati dan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan penjualan Minuman Beralkohol.

e. Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Tuban rata-rata bermata pencaharian dari bercocok tanam/pekebun atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain:

- 
- a) Tanaman pangan
 - b) Hortikultura
 - c) Perkebunan
 - d) Perikanan
 - e) Peternakan
 - f) Kayu pertukangan dan kayu bakar
 - g) Industri pengolahan besar dan sedang
 - h) Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
 - i) Perdagangan
 - j) Hotel dan restoran
 - k) Hasil tambang
 - l) Pariwisata

Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan yang ke dua adalah perkebunan bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai penadap “Tuak” atau sebagai Pemroduksi minuman tradisional beralkohol “Tuak”. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan

perkembangannya selain sektor tanaman pangan antara lain pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi, pariwisata dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan laut.⁵³

f. Kebudayaan

Tak hanya kaya akan tempat wisata, Kota Tuban juga kaya akan budaya, seperti tarian sandur yang merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal. Biasanya acara ini dilaksanakan dengan masyarakat yang sebelumnya sudah mabuk setelah mengonsumsi minuman “Tuak”. Lalu, lagu tomo ati yang diciptakan oleh salah satu wali yang termasuk wali songo yaitu Sunan Bonang dan yang lain seperti peringatan haul Sunan Bonang dan sedekah bumi.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban

a. Letak Kantor

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berada dalam satu kompleks Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten yakni di Jl. RA Kartini No.2, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Tengah Kota berhadapan dengan Alun-alun Kota Tuban.

b. Visi dan Misi

Visi dari satuan polisi pamong praja adalah mewujudkan daerah jawa timur yang kondusif melalui penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ikut serta melindungi masyarakat. Adapun misi dari satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalahan dan harmoni sosial Jawa Timur;

⁵³ Ibid, hal. 56

2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP/ Pemerintah, Swasta/ Industri, dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah;
3. Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat diwilayah rawan dan anggota satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan pam swakarsa;
4. Meningkatkan sarana prasarana operasional Tribumtranmas dan Linmas;
5. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

c. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Hak :

- a) Polisi Pamong Praja mempunyai hak atau prasarana yang sama serta fasilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b) Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode etik Polisi Pamong Praja.
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- d) Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukanya atau diduga adanya tindak pidana.
- e) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukanya atau diduga patut adanya pelanggaran terhadap Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati/Walikota.

d. Tugas dan Fungsi

Sesuai pasal 1 angka (7) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, Satuan polisi pamong praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten tuban.⁵⁴

Tugas dari satuan polisi pamong praja kabupaten tuban tercantum dalam Bab IV Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban yaitu, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan dari pelaksanaanya.

Fungsi satuan polisi pamong praja kabupaten tuban telah tercantum dalam dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, yaitu sebagai berikut⁵⁵ :

⁵⁴ Pasal 1 angka (7) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

⁵⁵ Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertinam umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban negara dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur negara atau badan hukum agar mematuhi semua peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

e. Struktur Organisasi.⁵⁶

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, yakni terdiri dari:

- 1) Kepala satuan
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a) Subbagian Program
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

⁵⁶ Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

- 3) Bidang penegakan perundang-undangan daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
 - a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
 - b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.⁵⁷

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - b) Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - c) Penyiapan dan penyediaan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - d) Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab satuan;
 - e) Pelaksanaan kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - f) Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kasat Pol-PP

⁵⁷ Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

3. Pelaksanaan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.⁵⁸
 - a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
 - d. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kasat Pol-PP terkait tugas dan fungsinya.
4. Seksi Operasi dan Pengendalian

Dalam melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:⁵⁹

 - a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang operasi dan pengendalian;

⁵⁸ Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

⁵⁹ Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang operasi dan pengendalian;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang operasi dan pengendalian;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang operasi dan pengendalian;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pengamanan dan pengawalan;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan rencana program kegiatan operasional dan pengendalian;
- j. Pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- l. Pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka dan tertutup;
- m. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- n. Pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - q. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.⁶⁰
- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Satpol-PP;
 - 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, serta pelayanan administratif di bidang Operasi dan Pengendalian serta Kerjasama.
 - 3) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

⁶⁰ Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban. Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 20

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengamanan dan pengendalian;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga lain;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- f. Pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan, dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol-PP; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol-PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Sumber Daya Manusia

1) Kepala Satuan : Hery Muharwanto, S.Sos

2) Sekretariat : Drs. Pujiyanto

- 3) Sub Bagian Keuangan : Dra. Sri Budi Utami
- 4) Sub Bagian Program dan Pelaporan : Aprilanda Wicaksono, SH
- 5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Eka Wahyuningsih, S.Sos
- 6) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah:
Wadiono, Sh, M.Hum
- 7) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
Drs. Sugeng Sutoto
- 8) Bidang Sumber Daya Aparatur : Saifuddin, SH
- 9) Bidang Perlindungan Masyarakat : Sumartono, SH
- 10) Seksi Penyelidikan dan penyidikan : Daryuti, SH, M.Hum
- 11) Seksi Operasional dan Pengendalian : Joko Herlambang, SH
- 12) Seksi Pelatihan Dasar : Edy Matnur, SH
- 13) Seksi Satuan Linmas : Supatman, SH

B. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban.

1. Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

“Tuak” adalah jenis minuman alkohol yang memiliki kadar rendah.⁶¹ Selain itu, Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma atau disebut juga bogor.

⁶¹ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono,S.H.,M.Hum.

Beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban terkenal dengan produksi Tuak karena memiliki begitu banyak pohon ental di setiap ladang yang dimiliki oleh petani. Setiap petani yang akan pulang ke rumah setelah selesai berkebun biasanya menyadap getah pohon ental tersebut dengan membawa beberapa peralatan seperti pisau, betek, dan daun yang biasanya di pakai sebagai fermentasinya, tergantung petani dengan memasukan daun lontar atau daun yang lain yang bisa digunakan sebagai campuran untuk membuat minuman tradisional tuak.

Tuak biasanya dijajakan setelah para petani atau para penyadap membawa turun hasil sadapnya ke rumah, biasanya juga di jajakan di bawah pohon saat ia menyadap. Para petani atau para penyadap tidak semuanya menjualnya sendiri, kebanyakan para petani atau penyadap memproduksi sebanyak-banyaknya untuk di setor kepada penjual tuak yang berada di warung-warung yang berjualan minuman keras. Warung-warung tersebut semuanya tidak memiliki izin untuk berjualan minuman beralkohol termasuk tuak, apalagi para petani atau penyadap tuak jelas adanya tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional “Tuak” ini.

Sebagai bagian dari alkohol, “Tuak” adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari sistem saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, “Tuak” ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.⁶²

⁶² Data primer hasil wawancara dengan Wadiono,S.H.,M.Hum

Sudah banyak kejadian yang sangat mengganggu ketertiban umum dan mengganggu ketentraman masyarakat karena adanya minuman beralkohol, biasanya para pemabuk tidak bisa mengontrol perilakunya saat di jalan, maupun di tempat umum yang lainnya. Dengan adanya pemabuk yang berada di tempat umum membuat masyarakat resah dengan ulahnya yang arogan. Saat ada acara keramaian di Kota Tuban banyak sekali pemabuk yang berkeliaran dan suka berkelahi dengan pengunjung lain. Efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol inilah yang biasanya mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Tuban.

“Tuak” merupakan salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau ental, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban seringkali menemukan kadar alkohol Tuak di Kabupaten Tuban ini adalah tidak lebih dari 3%. Hasil yang di dapat Satuan Polisi Pamong Praja berbeda-beda, ada yang tidak sampai dengan 1% ada juga yang sampai 3% kadar alkoholnya.⁶³

Di kabupaten Tuban ada seorang pedagang yang dapat membuat “Tuak”. Cara membuat “Tuak” menurut penduduk Semanding dalam membuat Tuak adalah sebagai berikut, 30 liter tuak buatan tersebut dibuat dari Tuak lama sebanyak 10 liter, Tuak baru 5 liter, Air 15 liter, ditambah secukupnya sari manis, untuk rasa “sepet” menggunakan Duwet atau Juwet dan

⁶³ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono, S.H., M.Hum

rasa pahit dengan menggunakan sambiloto. Kadang-kadang sari manis tidak digunakan. Tuak lama adalah tuak yang memang disimpan dalam waktu yang sudah lama. Tuak lama biasanya kandungan alkoholnya agak tinggi. Tuak baru memang dimaksudkan untuk menjaga aroma dan rasa tuak buatan. Buah juwet yang kelat atau “sepet” dan sambiloto yang pahit memberi kesan sepet pahitnya rasa tuak.⁶⁴

Untuk membuat “Tuak” murni yakni proses pembuatannya hampir sama dengan pembuatan minuman legen. Pucuk bunga siwalan diiris secara tipis dan getah yang keluar ditampung pada “bumbung” wadah terbuat dari ruas bambu panjang 40-50 cm. Bila pada pembuatan legen, bumbung itu harus dicuci bersih, untuk membuat tuak ini bumbung justru tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran yang melekat pada bumbung itulah yang berpengaruh pada proses fermentasi pada air nira sehingga menjadi tuak. Beberapa pembuat tuak ada yang menambahkan irisan kulit pohon dari tanaman jambu, juwet atau jambang, mengkudu atau pace dan sebagainya.

Sebagaimana hasil fermentasi lain, “Tuak” Tuban juga mengandung alkohol. Terlalu banyak mengonsumsi “Tuak” bisa membuat orang mabuk. Dulu pedagang “Tuak” di Tuban berjualan menggunakan ongkek atau pikulan yang terbuat dari bambu, tetapi sekarang sudah tidak terlihat lagi pedagang “Tuak” yang menggunakan ongkek semua penjual sekarang menggunakan kendaraan bermotor saat berjualan. Sebotol “Tuak” dijual seharga

⁶⁴ Data primer hasil wawancara dengan Rasdam

Rp 3.000. Para pedagang biasanya sudah mulai berjualan sejak pagi, dan hingga larut malam pun masih bisa ditemui.⁶⁵

Kabupaten Tuban memiliki beberapa minuman khas yakni Legen dan “Tuak”. Cara pembuatan Legen dan “Tuak” sama-sama berfermentasi, akan tetapi kalau “Tuak” fermentasinya mengandung alkohol sedangkan Legen tidak mengandung alkohol. Menjadi “Tuak” yang beralkohol, karena di dalam “bethek” diberi media tumbuhnya jamur yang oleh orang Tuban disebut “jatu”. “Jatu” ini biasanya terbuat dari kulit pepohonan yang dikeringkan, ditumbuk dan dipotong-potong. Selanjutnya dimasukkan ke “bethek” ketika hendak menyadap. Ketika cairan menetes ke “bethek” bercampur dengan “jatu”, maka terjadilah fermentasi dan terjadilah “Tuak”. Bahkan untuk mengasikkan rasa yang pahit atau warnanya menjadi merah biasanya dicampurkan irisan kulit (babakan) pohon Juwet.

Dalam satu hari dilakukan penyadapan dua kali pagi dan sore hari. Proses fermentasi ini terus berlangsung ketika Legen atau “Tuak” diambil dari pohon yang akan merubah rasa dan aromanya. Biasanya “Tuak” dan Legen yang asli hanya memiliki masa layak minum 4 sampai 5 jam setelah penyadapan karena fermentasi yang terus berlangsung.

Walaupun “Tuak” mengandung alkohol namun kadar yang dimiliki tidaklah terlalu tinggi, itulah sebabnya bagi sebagian masyarakat Tuban minuman “Tuak” biasa dijadikan sebagai teman ngobrol atau biasa disebut dengan “kongkow” diwarung-warung tradisional. Akan tetapi kalau kebanyakan tetap saja bisa memabukkan.⁶⁶

⁶⁵ Data primer hasil wawancara dengan Witanto

⁶⁶ Data primer hasil wawancara dengan Witanto

Namun dibalik aspek negatif yang dimiliki “Tuak”, terdapat manfaat yang besar dari toak atau adanya sisi positif yaitu sebagai obat atau penambah stamina tubuh, selain juga bisa menyembuhkan orang yang terkena sakit kencing batu. “Tuak” dapat menjadi obat penawar dari pada obat yang lain dan oprasi. Cukup dengan minum toak satu gelas besar dua kali sehari sudah dapat melancarkan buang air kecil dan melarutkan batu-batu kapur dalam ginjal.

Tradisi meminum tuak di sore hari mungkin sudah dijadikan tradisi sebagian masyarakat asli Tuban. Pada zaman penjajahan belanda dijadikan sebagai minuman yang memabukkan agar masyarakat tuban menjadi berani untuk melawan rasa takut kepada penjajah belanda karena sudah mabuk terkena reaksi minuman tradisional Tuak ini.⁶⁷

Saat ini tradisi itu masih berjalan tetapi pada zaman dan di era yang berbeda. Era modern ini masyarakat tuban telah salah menggunakan minuman tradisional ini untuk mabuk-mabukan di tempat umum yang membuat keresahan masyarakat lainya dan mengganggu ketertiban umum.

Tabel 4

Klasifikasi Minuman Beralkohol

No	Golongan	Keterangan
1	A	Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)

⁶⁷ Data primer hasil wawancara dengan Ahmad Hasyim

2	B	Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3	C	Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C^2H^5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) ⁶⁸

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa minuman beralkohol mempunyai 3 (tiga) golongan. Golongan A merupakan golongan minuman beralkohol yang dapat dikategorikan minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol rendah yaitu 1% sampai dengan 5%. Minuman tradisional beralkohol “Tuak” tuban termasuk dalam golongan A.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan tindak lanjut dengan adanya operasi gabungan terkait minuman beralkohol termasuk juga minuman tradisional beralkohol “Tuak”. Bagi pengguna yang sudah terkena efek dari minuman beralkohol apapun yang mengganggu ketertiban umum akan langsung ditindak lanjut oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tugas dan fungsinya sebagai aparat daerah. Apabila tidak ada jadwal operasi Satuan Polisi Pamong Praja juga siap melakukan tindak lanjut atau operasi dadakan bila ada laporan masuk dari

⁶⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, tambahan lembaran daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 seri E nomor 21

masyarakat. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak bisa berjalan optimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban sering kali melakukan operasi dengan adanya penjualan minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang diajakan di pinggiran kota dan di dalam kawasan kota. Bagi penjual yang berjualan di atas trotoar dan di pinggir jalan lah yang biasanya menjadi target operasi minuman tradisional beralkohol “Tuak” ini.

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran dan membawa barang bukti dari penjual serta membuat surat peringatan dengan tanda tangan penjual di atas materai. Surat peringatan itu juga mengetahui Kepala Desa dan Camat sesuai alamat penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” tersebut. Menurut Bapak Wadiono selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, bahwa dengan diberikan surat peringatan saja para penjual yang pernah terjaring operasi Satpol PP sudah tidak berani berjualan minuman tradisional beralkohol “Tuak” lagi karena menurutnya para penjual sudah merasa malu karena surat peringatan tersebut diketahui dan diawasi oleh Kepala Desa serta Camat dimana ia tinggal.⁶⁹

Penjual yang telah terjaring operasi tidak pernah muncul lagi berjualan, namun terdapat penjual-penjual lain yang menggunakan lokasi lama tersebut untuk berjualan kembali seperti tidak ada habisnya. Mungkin di Kabupaten Tuban ini terlalu banyak yang memproduksi tuak di daerah-daerah kecamatan sehingga banyak juga yang memasok atau menjual di wilayah kota. Para penjual yang berjualan dalam kota bukan merupakan penduduk kota, melainkan penduduk dari

⁶⁹ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono, S.H., M.Hum

kecamatan yang bermata pencaharian sebagai penyadap atau pemroduksi minuman beralkohol tradisional “Tuak”.

Adanya operasi minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang dilakukan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja setidaknya sudah mengurangi penjual “Tuak” di dalam kota. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga siap menindak lanjut bila ada laporan masyarakat adanya penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang di rasa mengganggu ketentraman masyarakat Kabupaten Tuban.

Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa memberikan sanksi administratif berupa denda dan atau memberikan sanksi pidana sesuai Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, karena dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja merasa kasihan dan tidak tega apabila mengenakan sanksi denda dan atau sanksi pidana bagi penjual tuak. Apabila penjual Arak karena kadar alkoholnya tinggi sekitar 20% persen, dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak segan-segan untuk memberikan sanksi pidana serta sanksi denda bagi penjual atau pemroduksinya. Bagi penjual dan pemroduksi Tuak hanya diberikan surat peringatan saja namun apabila masih tertangkap lagi saat operasi maka akan ditindak lanjut dengan memberikan sanksi denda dan sanksi pidana.

Selama ini Aparat Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah memberikan sanksi lain kepada penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” hanya dengan surat peringatan saja. Karena Aparat Satpol PP belum pernah menemukan penjual yang pernah terjaring operasi berjualan lagi. Dengan demikian tanpa adanya izin berjualan minuman beralkohol golongan A dengan jenis minuman beralkohol

tradisional “Tuak” tidak dipermasalahkan oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, karena sejauh ini tidak ada satu penjual pun yang memiliki izin menjual dan atau memproduksi minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban ini.

Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah beroperasi di tempat pemroduksi minuman tradisional beralkohol “Tuak” karena tempat produksinya yang jauh dari Kota Tuban. Satuan Polisi Pamong Praja Juga Tidak bisa langsung memastikan bahwa penyadap tersebut akan membuat minuman tradisional tuak atau membuat minuman legen. Bisa saja para penyadap beralasan akan membuat minuman legen bukan minuman tuak, karena untuk menjadikan minuman tradisional beralkohol tuak harus diawali dari legen dahulu baru beberapa jam menjadi minuman tradisional beralkohol “Tuak”.⁷⁰

Beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban yang paling banyak memproduksi minuman tradisional beralkohol “Tuak” dilihat dari banyaknya pohon bogor atau ental antara lain adalah Kecamatan Semanding, Kecamatan Palang, Kecamatan Montong, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Singgahan, dan Kecamatan Kerek. Di daerah kecamatan tersebut di atas minuman tradisional beralkohol “Tuak” banyak diproduksi, sebagian dijual di wilayah kecamatan tersebut dan sebagian lagi di jual di kawasan dalam kota. Masyarakat dalam kota ternyata juga masih banyak yang setiap malam meminum minuman tradisional beralkohol “Tuak”. Biasanya dijual di sepanjang trotoar jalan peminum berbaris rapi berjejer sampai larut malam.

⁷⁰ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono,S.H.,M.Hum

Tabel 5

Daftar Penjual “Tuak” yang pernah didapati dan diberikan surat peringatan.

NO.	LOKASI	RELOKASI	WAKTU BERJUALAN
1	Jl. Moh. Yamin	Jl. Moh. Yamin dengan ditutup Tabir Sehingga Tidak Kelihatan	Sore hari
2	Jl. Teuku umar	Jl. Teuku Umar dengan ditutup Tabir Sehingga Tidak Kelihatan	Siang hari
3	Merakurak (Jl. Menuju Ds. Koro)	Merakurak (Jl. Menuju Ds. Koro) masuk ke dalam Warung dan di beri Tabir	Sore hari
4	Jl. RE. Martadinata	Jl. RE. Martadinata sudah tidak berjualan	Habis Maghrib
5	Jl. Al - Falah dekat Jembatan Serincik	Jl. Al - Falah dekat Jembatan Serincik ditutup Tabir Sehingga Tidak Kelihatan	Pagi Hari
6	Jl. P. Sudirman (Depan Dealer Suzuki)	Jl. P. Sudirman (Depan Dealer Suzuki) Pindah Masuk Gg. Pasar Ikan	Habis Maghrib
7	Jl. Pasar Perbon	Jl. Pasar Perbon Pindah Masuk ke dalam Pasar Tertutup Pagar Pasar	Habis Maghrib
8	Depan Perum Siwalan	Depan Perum Siwalan Pindah masuk ke Jl. Ds. Kembangbilo	Sore hari
9	Jl. Soekarno – Hatta	Jl. Soekarno - Hatta sudah tidak berjualan	Sore hari
10	Jl. Gajahmada (Depan Terminal Kebonsari)	Jl. Gajahmada (Depan Terminal Kebonsari) sudah tidak berjualan	Habis Maghrib
11	Jl. Letda Sucipto	Jl. Letda Sucipto sudah tidak berjualan	Habis Maghrib
12	Utara Ds. Kembangbilo	Utara Ds. Kembangbilo Pindah masuk ke tegalan dan ditutup tabir sehingga tidak kelihatan	Siang hari
13	Jl. Dr. Soetomo	Jl. Dr. Soetomo (Masuk Kedalam Gudang)	Habis Maghrib

Sumber : Data Sekunder

Dilihat dari tabel 5 di atas hanya 13 penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang pernah terjaring operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban selama tahun 2017-2018. Jumlah itu terlalu sedikit padahal bila dilihat masih banyak penjual “Tuak” di sekitaran kota yang masih berjualan sampai saat ini. Pasti ada faktor yang menyebabkan minuman tradisional beralkohol ini sulit untuk ditertibkan. Beberapa faktor itu diawali karena susahnyanya dalam mengoperasi saat para penyadap atau pembuat minuman tradisional beralkohol “Tuak” membuatnya di tengah perkebunan.

Menurut ruang lingkupnya pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan instansi tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Terhadap penjual yang memperdagangkan Minuman Beralkohol, yang melakukan Pengawasan Intern adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
- b. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. Pihak yang berwenang melakukan Pengawasan Ekstern terhadap penjual Minuman Beralkohol di Kabupaten Tuban adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Menurut sifatnya pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan. Pengawasan Preventif ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa mengontrol terlebih dahulu terhadap tempat-tempat atau warung-warung yang biasa digunakan untuk berjualan Minuman Beralkohol.

- b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini yang melakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak terkait lainnya seperti Kepolisian di Kabupaten Tuban yaitu dengan melakukan penyitaan barang bukti hasil penjualan Minuman Beralkohol karena sudah adanya aturan dari pemerintah bahwa berjualan Minuman Beralkohol itu ada peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah.

Tabel 6

Bentuk Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2017

NO	BULAN	KEGIATAN
1	Januari	-
2	Februari	Aktif
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	Aktif
7	Juli	Aktif
8	Agustus	-
9	September	-

10	Oktober	Aktif
11	November	-
12	Desember	Aktif

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilakukan 5 kali dalam setahun penuh di tahun 2017.

Tabel 7

**Bentuk Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2018**

NO	BULAN	KEGIATAN
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	Aktif
7	Juli	Aktif
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

Sumber : Data Sekunder

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja hanya dilakukan 2 kali dalam setahun saat akan memasuki bulan puasa romadhon saja.

C. Hambatan serta solusi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan cara pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengawasi peredaran dan penjualan semua jenis minuman beralkohol termasuk minuman tradisional beralkohol “Tuak”. Peraturan Daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya instansi dan aparat pemerintah yang menjalankan. Peraturan Daerah ini merupakan pembaruan, dan tidak banyak yang diperbarui pada Peraturan Daerah sebelumnya.⁷¹

Walaupun di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah sangat jelas peraturanya dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol namun tidak mudah untuk menjalankannya. Dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah ini pasti ada kendala dan hambatanya yang membuat pelaksanaan tidak berjalan dengan lancar. Hambatan tersebut berasal dari luar (eksternal) dan hambatan dari dalam (internal). Beberapa

⁷¹ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono, S.H., M.Hum

faktor yang menjadi hambatan dan tidak maksimalnya peraturan daerah ini diantaranya:⁷²

1. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui keberadaan Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini. Baik para penjual maupun pengguna minuman tradisional beralkohol “Tuak” tidak tahu bahwa menjual minuman tradisional beralkohol menurut peraturan daerah yang mengatur harus mempunyai izin dalam menjual. Masyarakat awam yang menjual maupun membeli tidak mengerti karena dasar pendidikan yang di bawah garis masyarakat yang modern kebanyakan yang menjadi penjual dan memproduksi adalah masyarakat desa yang lumayan jauh dari kota.
2. Tidak adanya sosialisasi bagi semua kalangan masyarakat tentang adanya perda yang mengatur minuman beralkohol dalam penjualannya. Bagi penegak peraturan daerah ini baru bisa bersosialisasi saat menjaring para penjual saat diadakanya oreperasi saja.
3. Peraturan daerah ini mengatur bahwa penjual minuman beralkohol golongan A harus mempunyai izin dari Bupati. Namun sampai sekarang tidak ada satupun izin yang dikeluarkan oleh bupati dalam penjualan minuman tradisional beralkohol “Tuak”.
4. Tidak adanya perintah dari Bupati untuk diadakanya operasi ke daerah-daerah pelosok kecamatan atau desa yang dilangsir sebagai pemroduksi tuak

⁷² Data prmer hasil wawancara dengan Wadiono,S.H.,M.Hum

dengan jumlah banyak sehingga bisa masuk ke dalam kota setiap menjelang sore dan malam hari.

5. Operasi gabungan dengan instansi lain yaitu Polisi dan TNI sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, namun operasi gabungan ini hanya pada saat menjelang bulan romadhon dan saat bulan romadhon saja.
6. Tidak adanya respon yang baik oleh penjual dan pembeli saat terkena razia dan diberikan wawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Menjadi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” sudah menjadi mata pencaharian kebanyakan masyarakat yang berada di Kabupaten Tuban. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memberi belas kasihan kepada mereka dan memberikan surat pernyataan di atas materai saja saat menjaring para penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” ini.
8. Pengguna atau pengonsumsi minuman tuak di Kabupaten Tuban sudah menjadikan hal ini sebagai tradisi dan budaya maka dari itu seperti tidak ada habisnya para pengonsumsi tuak ini sering ada di dalam maupun pinggiran Kota Tuban.
9. Tidak pernah ada pemberian sanksi yang lebih berat bagi penjual yang bisa membuat jera agar tidak menjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” lagi.

Dari sekian banyak hambatan serta kendala sebagai faktor penghambat di laksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Satuan

Polisi Pamong Praja tidak tinggal diam dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

Polisi Pamong Praja juga mengupayakan agar peraturan daerah ini dapat terlaksana walaupun dirasa belum cukup efektif dan berjalan lancar. Beberapa upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban diantaranya:⁷³

1. Mengupayakan untuk lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban agar masyarakat menerima keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
2. Setelah masyarakat sudah mulai terbuka maka Satuan Polisi Pamong Praja bisa melaksanakan tugasnya untuk mengawasi serta mengendalikan masalah adanya minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.
3. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja apabila melihat dan merasa terganggu dengan adanya penjual dan peminum yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Tuban.
4. Siap tanggap dengan adanya laporan dari masyarakat untuk melakukan operasi sebagai tindak lanjut untuk tercapainya keamanan dan kenyamanan masyarakat.
5. Mengajak kepala desa serta camat yang menjadi domisili bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” untuk mengawasi penjual tersebut agar tidak berjualan lagi.

⁷³ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono, S.H., M.Hum

6. Mengadakan operasi gabungan yang melibatkan instansi lain yaitu dengan Polisi dan TNI.

Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran keseimbangan dari seluruh dinas-dinas pemerintahan terkait.

Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Dengan demikian diperlukan kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.⁷⁴

Muncul pertanyaan kenapa penegakan hukum itu ada kendala, berdasarkan teori hukum proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut⁷⁵ :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah

⁷⁴ Data primer hasil wawancara dengan Wadiono, S.H., M.Hum

⁷⁵ Soerdjono Soekanto, **penegakan hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 29

ditetapkan (W. Zevenbergen) apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann).

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini akan efektif jika kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar suatu kaidah berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur diatas karena bila suatu kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (dode regel), kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel), dan apabila berlaku secara filosofis kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituedum). Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dimana kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum dan warga yang terkena ruang lingkup peraturan yang berlaku⁷⁶.

Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada

⁷⁶ Ibid hal 30

manusia yang melaksanakan proses hukum. Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan kaedah-kaedah hukum masih kurang dimana masih adanya kaedah-kaedah yang berdasarkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan.

Sikap menolak hukum yang asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah non hukum sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat. Secara asumptif terdapat harapan yang kuat, bahwa penegakan hukum adalah harapan kedua sesudah kaedah hukum adat. Keadaan ini masih tampak di daerah pinggiran atau pedalaman di Indonesia. Kecenderungan aparat yang menyelesaikan masalah adalah perangkat desa.

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka "role-expectation" terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum.

Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum minuman beralkohol "Tuak" mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jika dari para penegak hukum saja tidak mungkin berjalan hukum yang ada. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku. Dari hipotesa diatas maka dapat disimpulkan bahwa implikasi Perda

pengendalian, pengawasan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dihubungkan dengan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang sudah didapatkan, dan dikaitkan dengan teori penegakan hukum, dimana secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Hasil wawancara memberikan keterangan bahwa bila ada penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol akan diberikan saksi awal berupa surat peringatan sehingga berdasarkan teori penegakan hukum, penerapan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sudah cukup baik namun masih kurang sempurna Karena masih banyak penjual-penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang tidak menjualnya secara terang-terangan dengan demikian sehingga mereka sangat sulit di dektesi keberadaanya.

Terkait dengan teori efektivitas hukum. menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁷

Melihat beberapa penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol ini sangat banyak dan kebanyakan yang menjadi kendala adalah dari masyarakat itu sendiri. Sangat sulit apabila yang ditegakkan merasa acuh dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol belum memenuhi unsur-unsur Efektivitas karena pelaksanaan masih ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan tersebut.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pengawasan dan Pengendalian dalam bentuk yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dalam mengontrol penjualan dan peredaran minuman beralkohol terutama minuman tradisional beralkohol “Tuak” di warung-warung maupun yang berjualan di pinggir jalan Kota Tuban masih kurang efektif, maka dengan cara memberikan sanksi yang lebih berat agar mempunyai dampak rasa jera bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak”. Tidak hanya itu, sosialisasi harus dilakukan dan harus mengenai target yang diinginkan. Tanpa adanya sosialisasi masyarakat awam tidak akan pernah tahu adanya peraturan daerah yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.
2. Hambatan terhadap pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol berasal dari :
 - a. Faktor Internal

Kurangnya staf dalam aparat pemerintah dan kurangnya mental yang baik aparat dalam menindak dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Tidak pernah ada pengeluaran izin dari bupati untuk memberikan SKPL-A bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak”.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya aturan yang membuat efek jera dan harga minuman tradisional beralkohol “Tuak” yang sangat terjangkau bagi kalangan luas serta kurangnya sosialisasi dari pihak instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

3. Upaya berupa solusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

a. Sisi Internal

Penambahan staf di dalam Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian, dan Aparat TNI saat beroperasi terkait penjualan minuman beralkohol serta peningkatan kesadaran diri bagi petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol agar patuh terhadap aturan.

b. Sisi eksternal

Meninjau kembali ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol agar memberikan jera bagi pelanggar serta aktif dalam memberikan sosialisasi tentang ijin SKPL-A bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” agar masyarakat tahu bahwa menjual minuman beralkohol itu harus mendapat izin dari Bupati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang dapat ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Meningkatkan kesadaran dalam diri petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol saat melakukan Operasi atau razia untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.
- b. Bersikap tegas saat melakukasn operasi dan razia saat di lapangan.
- c. Kurangnya pembagian staf disetiap wilayah Kabupaten Tuban untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban.

2. Masyarakat

- a. Bagi penjual, untuk lebih memahami bahwa berjualan minuman tradisional beralkohol juga harus memiliki izin dari Bupati. Selanjutnya apabila sudah pernah terkena razia saat berjualan minuman tradisional beralkohol “Tuak” kiranya tidak bejualan lagi setelah mendapat surat peringatan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
- b. Bagi tokoh masyarakat, untuk ikut serta dalam memberikan pengawasan serta bimbingan bagi warga sekitar yang berjualan maupun bagi peminum minuman tradisional beralkohol “Tuak”.
- c. Bagi masyarakat luas, untuk ikut berpartisipasi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban dengan memberikan informasi dan pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan optimal.

3. Pembuat undang-undang.
 - a. Membuat aturan yang lebih jelas lagi dalam pemberian sanksi yang kiranya dapat memberikan efek jera lagi dari peraturan sebelumnya bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” di Kabupaten Tuban.
 - b. Mengeluarkan izin bagi penjual minuman tradisional beralkohol “Tuak” SKPL-A bagi penjual yang telah mengajukan izin kepada Bupati.



Lampiran Gambar :

1.



2.



3.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.S.T Kansil, **Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Helmi, **Hukum Perizian Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Local Wisdom. "Tradisi Nitik di Tuban". Media Indonesia. Sabtu. 26 Maret 2011.
- Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi**, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1993.
- Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Jakarta, PT.Gramedia, 2009.

Internet :

Arlinton Hutagalung, “Pemahaman Tentang Tuak”, <http://arlintonhutagalung.blogspot.co.id/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html>

“Bahas Ranperda Miras, Minuman “Tuak” Khas Tuban Terancam Punah”, Bangsa Online.com

Wong Tasik Madu, “Cara Membuat Toak Tuban”, <http://kota-tuban.blogspot.co.id/2012/07/caramembuat-toak-tuban.html>

Curva Green, “Budaya Minum Tuak di Kota Tuban”, <http://curvagreen.blogspot.co.id/2013/09/budaya-minum-toak-di-kota-tuban.html>

Krina Indah Puspitasari, “Seputar Kota Tuban”, [http://Catatan Nana SEPUTAR KOTA TUBAN \(Kota KelahiranKu\)](http://Catatan Nana SEPUTAR KOTA TUBAN (Kota KelahiranKu))

P-Nus, “Legen dan Tuak Tuban”, <http://PNus-Legen-dan-Tuak-Tuban>

Paring Waluyo Utomo, “Tradisi Tuak dan Perempuan Tuban”, <http://tradisi-tuak-dan-peranperempuan-tuban-srinthil>.

<https://tarunakompetisi18.blogspot.com/2017/05/profil-lengkap-kabupaten-tuban.html> diakses pada 17 juli 2018, 13.50 WIB.

ppsp.nawasis.info/.../kab.tuban, diakses pada 17 juli 2018 pukul 13.30 WIB.

www.tubancity.com/letak-kota-tuban-jawa-timur.html, diakses pada 17 juli 2018 pukul 13.30 WIB

Jurnal dan Skripsi:

Beny Ari Gunawan, **Optimalisasi Pelayanan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan**, skripsi tidak diterbitkan, fakultas hukum, universitas brawijaya, 2012.

Syahrul Yasin Limpo, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan pengawasan Fungsional Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**, Desertasi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2007.

Satrio Wibowo, **Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan**

Perdagangan Kabupaten Tulungagung, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

Sukma Mardiyah Panggabean. **“Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015”**. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

